



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	7
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja .....	7
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja .....	8
2.1.4 Faktor – faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan .....	8
2.1.5 Identifikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah .....	9
2.1.6 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Review terhadap Renja RKPD .....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>31</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	31
3.3 Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>44</b>
4.1 Faktor – Faktor Bahan Rumusan Program dan Kegiatan .....	44
4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, hal ini merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Akuntabilitas dan Transparansi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing.

Demikian dokumen ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus, 12 Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KUDUS



**Drs. KHOLID, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650130 199203 1 005

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Kabupaten Kudus .....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Kudus Tingkat: Rancangan Rkpd Perangkat Daerah Perangkat Daerah: 1.05.02: Satuan Polisi Pamong Praja.....	20
Tabel 2.4	Pemetaan Program Dan Kegiatan Renstra/Rpjmd Ke Dalam Kemendagri 050-3708 Tahun 2020.....	23
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kudus .....	27
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan .....	29
Tabel 4.1	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Kudus Tingkat: Rkperangkat Daerah Perangkat Daerah: 1.05.02: Satuan Polisi Pamong Praja .....	34
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dipertimbangkan Kabupaten Kudus Tingkat: Rkperangkat Daerah Perangkat Daerah: 1.05.02: Satuan Polisi Pamong Praja .....	37
Tabel 4.3	Rekapitulasi Program/Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPERANGKAT DAERAH) Tahun 2022 .....	40

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	2
------------	--	---

**1.1. Latar Belakang**

Dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Rencana Kerja yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

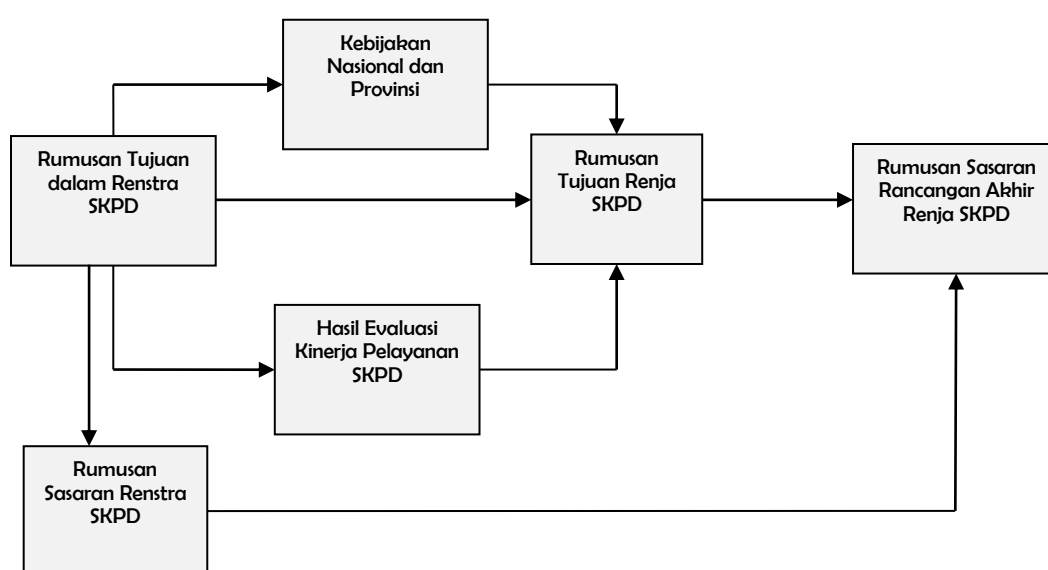
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah**



**1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8



- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 496);
  23. Perda Prov. Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Jateng Tahun 2019 – 2029 (Lembaran Daerah Prov. Jateng Tahun 2010 Nomor 6 Tentang Lembar Daerah Prov. Jateng Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jateng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Prov. Jateng Tahun 2009 – 2029 (Lembar Daerah Prov. Jateng Tahun 2019 Nomor 16. Tentang Lembar Daerah Prov. Jateng Nomor 121);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Prov Jateng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
32. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus adalah:

- a. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
- b. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program – program prioritas.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
  - 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
  - 2.1.4 Faktor – faktor tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
  - 2.1.5 Identifikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah
  - 2.1.6 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Faktor – Faktor Bahan Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### **BAB IV PENUTUP**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447). Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus juga harus dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

**2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,58%.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,13%.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebesar 100% dan realisasi 95,68%.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target sebesar 100% dan realisasi 86,88%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,92%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 94,52%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,53%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target sebesar 100% dan realisasi 98%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebesar 100% dan realisasi 96,63%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,27%.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 97,03%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,57%.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,07%.
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan target sebesar 100% dan realisasi 90,74%.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% dan realisasi 97,15%.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,24%.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,84%.
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,44%.
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% dan realisasi 91,45%.
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,83%.
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,8%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana dengan target sebesar 100% dan realisasi 71,95%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- Nihil
- 2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan, antara lain:
- Banyaknya kegiatan tambahan sehingga berbenturan untuk waktu pelaksanaannya sehingga kegiatan masih belum maksimal dalam penyelenggaraannya.
  - Kegiatan tambahan penanganan pandemi bersifat mendadak sehingga kurang maksimal dalam perencanaan kegiatan.
  - Perubahan anggaran kegiatan membuat kegiatan sudah direncanakan tidak dapat diserap secara maksimal.
  - Tidak stabilnya kondisi Pemerintahan Daerah karena pandemi sehingga membuat perubahan dalam perencanaan. sehingga menjadi kurang tertata.
- 2.1.5 Identifikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah:
- Perencanaan yang diambil pada kegiatan momentual seperti PILEG, PILPRES dan PILKADES sudah direncanakan untuk mengatasi kegiatan momentual tersebut.
  - Perencanaan anggaran kegiatan yang difokuskan sudah dirancang secara dinamis apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaannya maka dapat dengan cepat disesuaikan.
- 2.1.6 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:
- Berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar bersama – sama ditertibkan.
  - Berkoordinasi dengan BAWASLU Kabupaten Kudus untuk menertibkan pelanggaran Reklame.
  - Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan RSUD dalam penanganan PGOT dan PMKS agar ditangani dengan tuntas.
  - Berkoordinasi dengan Stakeholder pelaksana pemilihan umum agar acara dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kabupaten Kudus**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021			Prakiraan Capaian Rencana Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		83 Indeks	75 Indeks	91,1 Indeks	109,76%	81 Indeks	81 Indeks
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PoI PP)	83 Indeks	75 Indeks	91,1 Indeks	109,76%	81 Indeks	81 Indeks
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	24 Dokumen				24 Dokumen	24 Dokumen
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PoI PP)	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang				53 Orang	53 Orang
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11 Orang				11 Orang	11 Orang
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen				12 dokumen	12 dokumen
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	6 Kali				6 Kali	6 Kali
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya	1 Orang				1 Orang	1 Orang
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Set				0 Set	0 Set
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	0 Orang				0 Orang	0 Orang
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali				10 Kali	10 Kali
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	30 Dokumen				30 Dokumen	30 Dokumen
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket				1 paket	1 paket
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Jenis				14 Jenis	14 Jenis
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket				1 paket	1 paket
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis				6 Jenis	6 Jenis
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2 Judul				2 Judul	2 Judul

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021			Prakiraan Capaian Rencana Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2 Unit</b>				<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit				2 Unit	2 Unit
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah PHD</b>	<b>3 Orang</b>				<b>3 Orang</b>	<b>3 Orang</b>
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Jenis				9 Jenis	9 Jenis
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang				5 Orang	5 Orang
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>37 Unit</b>				<b>37 Unit</b>	<b>37 Unit</b>
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah asa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 Mobil 22 Motor				15 Mobil 22 Motor	15 Mobil 22 Motor
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit				10 Unit	10 Unit
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket				1 Paket	1 Paket
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket				1 Paket	1 Paket
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>94%</b>	<b>134,23%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>
		<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>125%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>
<b>1.05.02.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15 Jenis</b>				<b>15 Jenis</b>	<b>15 Jenis</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Kasus				1 Kasus	1 Kasus
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	30 Kali				30 Kali	30 Kali
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	6 Kali				6 Kali	6 Kali
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli	100 Kali				100 Kali	100 Kali
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan	20 Kali				20 Kali	20 Kali
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	60 Orang				60 Orang	60 Orang
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus				12 Kasus	12 Kasus
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	133 Kali				133 Kali	133 Kali



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021			Prakiraan Capaian Rencana Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa	20 Kali				20 Kali	20 Kali
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	20 Kali				20 Kali	20 Kali
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	316 Kali				316 Kali	316 Kali
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya	400 Orang				400 Orang	400 Orang
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan	300 orang				300 orang	300 orang
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	1,34 Orang/RT				1,34 Orang/RT	1,34 Orang/RT
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500 Orang				3500 Orang	3500 Orang
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM	200 Orang				200 Orang	200 Orang
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Kali				5 Kali	5 Kali
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Unit				0 Unit	0 Unit
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik	31 Stel				31 Stel	31 Stel
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 Dokumen				9 Dokumen	9 Dokumen
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3 Kasus				3 Kasus	3 Kasus
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>3 Stategi</b>				<b>3 Stategi</b>	<b>3 Stategi</b>
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 Orang				100 Orang	100 Orang
		Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana	100 Tayang				100 Tayang	100 Tayang
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	100 Kali				100 Kali	100 Kali
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	86 Kali				86 Kali	86 Kali

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021			Prakiraan Capaian Rencana Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	85%	84%	84%	100%	85%	85%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	7 menit				7 menit	7 menit
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	21 Kasus (Kejadian)				21 Kasus (Kejadian)	21 Kasus (Kejadian)
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	21 Kasus (Kejadian)				21 Kasus (Kejadian)	21 Kasus (Kejadian)
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar	0 Unit				0 Unit	0 Unit
		Jumlah pengadaan sarpras damkar	0 Unit				0 Unit	0 Unit
		Jumlah TKP damkar	26 Orang				26 Orang	26 Orang
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	300 Objek				300 Objek	300 Objek
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1200 Unit				1200 Unit	1200 Unit
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Penanganan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0%	50%	71,95%	143,90%	0%	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan Covid 19	0%	50%	71,95%	143,90%	0%	0%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penanganan Covid 19	0%	50%	71,95%	143,90%	0%	0%

Capaian Kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah 91,1 Indeks dengan 75 Indeks, maka capaian tingkat kinerja adalah 109,76%. Untuk perkiraan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah 100% dengan target kinerja 83 Indeks.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan serta memiliki sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban. Penambangan dan Pembangunan Fisik (Gedung dan Bangunan) yang marak dan cenderung mengabaikan regulasi yang ada di wilayah Kabupaten Kudus juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kudus, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Kudus relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Di samping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kudus menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Peningkatan Kemampuan Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus :

### **2.2.1 Faktor Internal:**

1. Masih perlunya kualitas (yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP bagi staf maupun pejabat eselon masih sedikit, serta tenaga teknis lainnya);
2. Masih perlu penambahan kuantitas personil (banyak personil yang memasuki masa purna tugas/pensiun);
3. Masih perlu penambahan pejabat fungsional polisi pamong praja;
4. Masih perlu penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
6. Masih perlunya penambahan Anggaran.

### 2.2.2 Faktor Eksternal:

1. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda Kabupaten Kudus yang berlaku di masyarakat;
3. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

#### a. Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada

Kerugian materil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- 2) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

#### b. Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten serta Perkada.

Warga negara sebagaimana dimaksud dengan kriteria:

- a. Yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- b. Berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah:

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan perkotaan;
- f. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan Kabupaten/Pedesaan;
- g. Monitoring dan evaluasi.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama PERANGKAT DAERAH	SPM/ Standar/ Nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1.	Indeks Rasa Aman	-	-	0,53	0,53	0,53	0,44	0,53	0,53	0,53	
2.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-	40	30	30	10	30	10	10	
3.	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	-	-	81	83	83	73,71	81	83	83	

No	SPM	Capaian Tahun		Tingkat Capaian	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	43	46	100%	100%

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menumbuh-kembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam Renja, sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD maka direncanakan untuk melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 12.291.394.000,-**. Dari usulan kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang merupakan kegiatan bersumber dari Pajak Rokok sebagaimana terlampir.

**Tabel 2.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS**  
**TINGKAT: RANCANGAN AWAL PERANGKAT DAERAH**  
**PERANGKAT DAERAH: 1.05.02: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	12.291.394.000		83,5 Indeks	13.520.533.400	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	9.151.724.530		83,5 Indeks	10.066.896.983	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Dokumen	14.097.814		24 Dokumen	15.507.595	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	9.404.584		12 Dokumen	10.345.042	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	4.693.230		12 Dokumen	5.162.553	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	7.971.689.046		12 Dokumen	8.768.857.951	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Orang	7.918.007.000		53 Orang	8.709.807.700	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Orang	49.560.000		11 Orang	54.516.000	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	4.122.046		12 dokumen	4.534.251	
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Kali	0		6 Kali	0	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	500.000.000		1 Orang	550.000.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Set	0		0 Set	0	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang	0		0 Orang	0	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kali	500.000.000		10 Kali	550.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Dokumen	43.714.000		30 Dokumen	48.085.400	

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023**



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1.800.000		1 paket	1.980.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Jenis	6.653.000		14 Jenis	7.318.300	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	4.039.000		1 paket	4.442.900	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Jenis	9.338.000		6 Jenis	10.271.800	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Jenis	5.000.000		2 Jenis	5.500.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Paket Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			2 Judul			2 Judul	0	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPDP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	16.884.000		5 Laporan	18.572.400	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2 Unit</b>	<b>8.860.000</b>		<b>2 Unit</b>	<b>9.746.000</b>	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	8.860.000		2 Unit	9.746.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah PHD</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3 Orang</b>	<b>228.570.000</b>		<b>3 Orang</b>	<b>251.427.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.000.000		1 Laporan	2.200.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Jenis	89.191.000		9 Jenis	98.110.100	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	137.379.000		5 Orang	151.116.900	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>37 Unit</b>	<b>384.793.670</b>		<b>37 Unit</b>	<b>423.273.037</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah asa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Mobil 22 Motor	302.396.200		15 Mobil 22 Motor	332.635.820	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	6.659.000		10 Unit	7.324.900	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	72.991.470		1 Paket	80.290.617	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	2.747.000		1 Paket	3.021.700	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas Cakupan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>80% 85%</b>	<b>2.262.923.470</b>		<b>80% 85%</b>	<b>2.489.215.817</b>	

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Jenis	2.192.923.470		15 Jenis	2.412.215.817	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kasus	2.124.400.000		1 Kasus	2.336.840.000	
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini			30 Kali			30 Kali		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan			6 Kali			6 Kali		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli			100 Kali			100 Kali		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan			20 Kali			20 Kali		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			60 Orang			60 Orang		
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Kasus	500.000		12 Kasus	550.000	
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban			133 Kali			133 Kali		
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa			20 Kali			20 Kali		
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa			20 Kali			20 Kali		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	55.000.000		12 Dokumen	60.500.000	
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			316 Kali			316 Kali		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	6.297.000		12 Dokumen	6.926.700	
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya			400 Orang			400 Orang		
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan			300 orang			300 orang		

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,34 Orang/RT	740.000		1,34 Orang/RT	814.000	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3500 Orang			3500 Orang		
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM			200 Orang			200 Orang		
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Kali	500.000		5 Kali	550.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			1 Dokumen			1 Dokumen		
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	3.100.000		0 Unit	3.410.000	
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik			31 Stel			31 Stel		
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	441.470		9 Dokumen	485.617	
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Kasus	1.945.000		3 Kasus	2.139.500	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Pajak Rokok</b>	<b>3 Strategi</b>	<b>70.000.000</b>		<b>3 Strategi</b>	<b>77.000.000</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	2.000.000		100 Orang	2.200.000	
					Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana	100 Tayang		18.000.000	100 Tayang	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Kali	0		100 Kali	0	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86 Kali	50.000.000		86 Kali	55.000.000	
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten</b>	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85%	876.746.000		85%	964.420.600	
		<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate)</b>			7 menit			7 menit		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket	
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Kasus (Kejadian)	870.746.000		21 Kasus (Kejadian)	957.820.600		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	870.746.000		12 Laporan	957.820.600		
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			21 Kasus (Kejadian)			21 Kasus (Kejadian)			
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar			0 Unit			0 Unit			
		Jumlah pengadaan sarpras damkar			0 Unit			0 Unit			
		Jumlah TKP damkar			26 Orang			26 Orang			
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Objek	6.000.000		300 Objek	6.600.000		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1200 Unit	6.000.000		1200 Unit	6.600.000		
<b>Total</b>			Total						<b>12.291.394.000</b>	<b>13.520.533.400</b>	

**Tabel 2.4**  
**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH: SATUAN POLISI AMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tahun 2023	
			Target	Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		83,5 Indeks	12.291.394.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	83,5 Indeks	9.151.724.530
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	24 Dokumen	14.097.814
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	12 Dokumen	9.404.584
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen	4.693.230
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen	7.971.689.046
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	7.918.007.000
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11 Orang	49.560.000
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	4.122.046
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	6 Kali	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	1 Orang	500.000.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Set	0
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	0 Orang	0
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	500.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	30 Dokumen	43.714.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.800.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Jenis	6.653.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.039.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	9.338.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	5.000.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2 Judul	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	16.884.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	8.860.000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.860.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PHD	3 Orang	228.570.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Jenis	89.191.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	137.379.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	37 Unit	384.793.670

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tahun 2023	
			Target	Pagu Indikatif
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah asa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 Mobil 22 Motor	302.396.200
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.659.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	72.991.470
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	2.747.000
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas</b>	<b>80%</b>	<b>2.262.923.470</b>
		<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>85%</b>	
<b>1.05.02.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15 Jenis</b>	<b>2.192.923.470</b>
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Kasus	2.124.400.000
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	30 Kali	
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	6 Kali	
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli	100 Kali	
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan	20 Kali	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	500.000
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	133 Kali	
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa	20 Kali	
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	20 Kali	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.000.000
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	316 Kali	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6.297.000
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya	400 Orang	
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan	300 orang	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	1,34 Orang/RT	740.000
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500 Orang	
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM	200 Orang	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Kali	500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Unit	3.100.000
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik	31 Stel	
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 Dokumen	441.470
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3 Kasus	1.945.000

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tahun 2023	
			Target	Pagu Indikatif
1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>3 Strategi</b>	<b>70.000.000</b>
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 Orang	2.000.000
		Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana	100 Tayang	18.000.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	100 Kali	0
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	86 Kali	50.000.000
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten</b>	<b>85%</b>	<b>876.746.000</b>
		<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate)</b>	<b>7 menit</b>	
1.05.04.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21 Kasus (Kejadian)</b>	<b>870.746.000</b>
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	870.746.000
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	21 Kasus (Kejadian)	
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar	0 Unit	
		Jumlah pengadaan sarpras damkar	0 Unit	
		Jumlah TKP damkar	26 Orang	
1.05.04.2.02	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran</b>	<b>300 Objek</b>	<b>6.000.000</b>
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1200 Unit	6.000.000
<b>Total</b>				<b>12.291.394.000</b>

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini pengaturan di dalam perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaan ketertiban umum harus mendasarkan aturan sehingga tidak berlaku sewenang-wenang sementara masyarakat di dalam berkehidupan bermasyarakat juga berpedoman kepada norma dan aturan yang berlaku.
2. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Asas kepentingan umum dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Dalam hal ini penyelenggaraan ketertiban umum memiliki tujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah agar tidak diselewengkan dan juga tidak mengalami gangguan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini mendahulukan kepentingan umum merupakan ruh dari upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
3. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satuan Polisi Pamong Praja yang



menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus didalam pelaksanaan kegiatannya selalu melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Dengan adanya kerjasama yang baik diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, secara umum koordinasi/kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dengan daerah perbatasan yang dikerjasamakan antara kabupaten, koordinasi dengan melibatkan instansi vertikal penegak hukum serta koordinasi dengan melibatkan PERANGKAT DAERAH baik di lingkungan Kabupaten Kudus maupun kabupaten telah berjalan. Kerjasama penanganan gangguan ketertiban umum juga berjalan dengan baik. Namun demikian, koordinasi yang berjalan saat ini masih dianggap belum optimal. Dalam hal ini koordinasi dan kerjasama perlu diperkuat dengan dibuat nota kesepakatan (MOU) atau perjanjian kerjasama antar PERANGKAT DAERAH di lingkungan Kabupaten Kudus sehingga memiliki ikatan yang kuat antar pihak.

Penelaahan pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus diperoleh dari pokok-pokok pikiran bersama DPRD Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui pelaksanaan Patroli Wilayah secara Humanis;
2. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui Sosialisasi Peraturan Daerah dengan membentuk Kader Penegak Perda dari generasi milenial (Pelajar SMU/SMK, Mahasiswa, Karang Taruna) dengan melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
3. Perlu adanya Tindak lanjut Kerjasama serta Peningkatan kinerja terhadap kegiatan yang dikerjasamakan bersama instansi terkait (TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan);
4. Meningkatkan Pelatihan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran sebagai upaya penanggulangan bencana, PAM Swakarsa dan penanggulangan kebakaran;
5. Meningkatkan kualitas performa Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai Pelatihan/ Pendidikan dan BinteK.

Berdasarkan hasil penelaahan pokok – pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka Rencana Program dan Kegiatan pemangku kepentingan diakomodir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**

**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Kudus**

**Nama Perangkat Daerah : Satpol PP Kabupaten Kudus**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>NIHIL</b>					

### 3.1. Telaahan Kebijakan Terhadap Nasional

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pemerintahan yang berkelanjutan yaitu *pro-growth*, *pro job*, dan *pro environment*. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan model pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus yaitu “Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”

Adapun Sasaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah;
2. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

**Tabel : 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bupati dan turunannya ke tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah diuraikan di atas, maka perlu diimplementasikan ke dalam program/kegiatan.

Program daerah yang selaras dengan misi ke-3 Bupati yaitu “Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif” adalah Program Pendidikan Karakter, dengan sasaran program daerah adalah Meningkatkan Karakter Masyarakat. Untuk mendukung program daerah tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Kudus melaksanakan 3 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tergolong urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang diturunkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Mendagri Nomor 121 Tahun 2018

Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2022 telah mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang di terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menetapkan beberapa faktor sebagai bahan rumusan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan sekretariat;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terwujudnya tujuan.

### **3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut ini:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD
    - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - c. Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD
  - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

### **2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

## **3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

### **3.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **3.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

- a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

**Tabel 3.2**  
**RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS**  
**TINGKAT: RKPERANGKAT DAERAH**  
**PERANGKAT DAERAH: 1.05.02: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	12.291.394.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	13.520.533.400		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	9.151.724.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,5 Indeks	10.066.896.983		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Dokumen	14.097.814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Dokumen	15.507.595		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	9.404.584	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	10.345.042		
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	4.693.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	5.162.553		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	7.971.689.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	8.768.857.951		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Orang	7.918.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Orang	8.709.807.700		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Orang	49.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Orang	54.516.000		
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	4.122.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 dokumen	4.534.251		
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Kali	0		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Orang	550.000.000		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Set	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Set	0		
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Orang	0		



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kali	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kali	550.000.000		
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>30 Dokumen</b>	<b>43.714.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>30 Dokumen</b>	<b>48.085.400</b>		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1.980.000		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Jenis	6.653.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Jenis	7.318.300		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	4.039.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	4.442.900		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Jenis	9.338.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Jenis	10.271.800		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Jenis	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Jenis	5.500.000		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			2 Judul			2 Judul	0		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	16.884.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	18.572.400		
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2 Unit</b>	<b>8.860.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2 Unit</b>	<b>9.746.000</b>		
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	8.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	9.746.000		
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah PHD</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3 Orang</b>	<b>228.570.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3 Orang</b>	<b>251.427.000</b>		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	2.200.000		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Jenis	89.191.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Jenis	98.110.100		
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	137.379.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	151.116.900		
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>37 Unit</b>	<b>384.793.670</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>37 Unit</b>	<b>423.273.037</b>		
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah asa pemeliharaan, biaya	Kab. Kudus, Kota Kudus,	PENDAPATAN	15 Mobil	302.396.200	PENDAPATAN	15 Mobil	332.635.820		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Barongan	ASLI DAERAH (PAD)	22 Motor		ASLI DAERAH (PAD)	22 Motor			
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	6.659.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Unit	7.324.900		
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	72.991.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	80.290.617		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	2.747.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	3.021.700		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80%	2.262.923.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80%	2.489.215.817		
		Cakupan Penegakan Perda dan Perkada			85%			85%			
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Jenis	2.192.923.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Jenis	2.412.215.817		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kasus	2.124.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kasus	2.336.840.000		
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini			30 Kali			30 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan			6 Kali			6 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli			100 Kali			100 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan			20 Kali			20 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			60 Orang			60 Orang			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Kasus	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Kasus	550.000	
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban			133 Kali				133 Kali		
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa			20 Kali				20 Kali		
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa			20 Kali				20 Kali		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	60.500.000	
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			316 Kali				316 Kali		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	6.297.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	6.926.700	
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya			400 Orang				400 Orang		
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan			300 orang				300 orang		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,34 Orang/RT	740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,34 Orang/RT	814.000	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3500 Orang				3500 Orang		
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM			200 Orang				200 Orang		
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Kali	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Kali	550.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
					1 Dokumen				1 Dokumen		
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	3.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	3.410.000		
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik			31 Stel			31 Stel			
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	441.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	485.617		
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Kasus	1.945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Kasus	2.139.500		
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>Pajak Rokok</b>	<b>3 Stategi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pajak Rokok</b>	<b>3 Stategi</b>	<b>77.000.000</b>		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	2.200.000		
		Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana			100 Tayang	18.000.000		100 Tayang	19.800.000		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Kali	0		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86 Kali	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86 Kali	55.000.000		
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten</b>	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85%	876.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85%	964.420.600		
		<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate)</b>			7 menit			7 menit			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Kasus (Kejadian)	870.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Kasus (Kejadian)	957.820.600		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	870.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	957.820.600		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Ket
			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			21 Kasus (Kejadian)				21 Kasus (Kejadian)		
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar			0 Unit				0 Unit		
		Jumlah pengadaan sarpras damkar			0 Unit				0 Unit		
		Jumlah TKP damkar			26 Orang				26 Orang		
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Objek	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Objek	6.600.000		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1200 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1200 Unit	6.600.000		
<b>Total</b>			Total		<b>12.291.394.000</b>		<b>13.520.533.400</b>				

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 berasal dari APBD dan 1 kegiatan berasal dari Pajak Rokok. Total rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebesar 12.291.394.000,-.

**Tabel 3.3**  
**RENCANA PROGRAM, KEGATAN PERANGKAT DAERAH YANG DIPERTIMBANGKAN KABUPATEN KUDUS**  
**TINGKAT: RKPERANGKAT DAERAH**  
**PERANGKAT DAERAH: 1.05.02: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Keterangan
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Indeks	12.291.394.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PoI PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Indeks	9.151.724.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	14.097.814	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PoI PP)	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	9.404.584	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart		12 Dokumen	4.693.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	12 Dokumen	7.971.689.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Orang	7.918.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Orang	49.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	12 dokumen	4.122.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	6 Kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	1 Orang	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	0 Set	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	10 Kali	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	30 Dokumen	43.714.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	1 paket	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	14 Jenis	6.653.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	1 paket	4.039.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Keterangan
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	6 Jenis	9.338.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	2 Jenis	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	2 Judul		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	5 Laporan	16.884.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>2 Unit</b>	<b>8.860.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	2 Unit	8.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah PHD</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>3 Orang</b>	<b>228.570.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	9 Jenis	89.191.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	5 Orang	137.379.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan</b>	<b>37 Unit</b>	<b>384.793.670</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah asa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	15 Mobil 22 Motor	302.396.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	10 Unit	6.659.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	72.991.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2.747.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas</b>	<b>Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>80%</b>	<b>2.262.923.470</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
		<b>Cakupan Penegakan Perda dan Perkada</b>		<b>85%</b>				
<b>1.05.02.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>15 Jenis</b>	<b>2.192.923.470</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kasus	2.124.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kali					
	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kali					
	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kali					

**Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Keterangan
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan		20 Kali				
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		60 Orang				
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		12 Kasus	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133 Kali				
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa		20 Kali				
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa		20 Kali				
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	55.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		316 Kali				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	6.297.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya		400 Orang				
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan		300 orang				
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,34 Orang/RT	740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3500 Orang				
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM		200 Orang				
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kali	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		1 Dokumen				
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	0 Unit	3.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik		31 Stel				
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Barongan	9 Dokumen	441.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Keterangan
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	1.945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>3 Strategi</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pajak Rokok</b>		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana		100 Tayang	18.000.000			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Kali	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Kali	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten</b>	<b>Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>85%</b>	<b>876.746.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
		<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate)</b>		<b>7 menit</b>				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Kasus (Kejadian)	870.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	870.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		21 Kasus (Kejadian)				
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar		0 Unit				
		Jumlah pengadaan sarpras damkar		0 Unit				
		Jumlah TKP damkar		26 Orang				
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Objek	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Unit	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
<b>Total</b>					<b>12.291.394.000</b>			

**4.1 Faktor – Faktor Bahan Rumusan Program dan Kegiatan**

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus menetapkan beberapa faktor sebagai bahan rumusan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan sekretariat;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terwujudnya tujuan.

**4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut ini :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD
    - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - c. Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
  - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD
  - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**2.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

**2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

**3.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

**3.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

- a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan**  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPERANGKAT DAERAH) Tahun 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		83,5 Indeks	12.291.394.000		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	83,5 Indeks	9.151.724.530		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	24 Dokumen	14.097.814		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Pol PP)	12 Dokumen	9.404.584		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen	4.693.230		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standart	12 Dokumen	7.971.689.046		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	7.918.007.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	11 Orang	49.560.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	4.122.046		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	6 Kali	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	1 Orang	500.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 Set	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	0 Orang	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali	500.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	30 Dokumen	43.714.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.800.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Jenis	6.653.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.039.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	9.338.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	5.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Barang Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2 Judul			
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	16.884.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	8.860.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.860.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PHD	3 Orang	228.570.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Jenis	89.191.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	137.379.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	37 Unit	384.793.670		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah asa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 Mobil 22 Motor	302.396.200		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.659.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	72.991.470		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	2.747.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	80%	2.262.923.470		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	85%			
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Jenis	2.192.923.470		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 Kasus	2.124.400.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	30 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pembinaan dan Penyuluhan	6 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Patroli	100 Kali			
		Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Pengawasan	20 Kali			
Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Tenaga Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	60 Orang					
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	500.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	133 Kali			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif		
		Jumlah Penanganan Kerusuhan Massa	20 Kali			
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa	20 Kali			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	316 Kali			
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	6.297.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah anggota Satlinmas yang meningkat kompetensinya	400 Orang			
		Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan	300 orang			
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Rasio Linmas dibanding dengan Jumlah RT	1,34 Orang/RT	740.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500 Orang			
		Jumlah Satpol PP dan Satlinmas yang meningkat kapasitasnya di Bidang HAM	200 Orang			
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Kali	500.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen			
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Unit	3.100.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Keadaan baik	31 Stel			
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 Dokumen	441.470		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3 Kasus	1.945.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>3 Stategi</b>	<b>70.000.000</b>		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 Orang	2.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Sosialisasi kegiatan penegakan Perda yang terlaksana	100 Tayang	18.000.000		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada tentang trantibum	100 Kali	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Rencana Tahun 2023		Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	86 Kali	50.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	85%	876.746.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	7 menit			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	21 Kasus (Kejadian)	870.746.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	870.746.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	21 Kasus (Kejadian)			
		Jumlah pemeliharaan sarpras damkar	0 Unit			
		Jumlah pengadaan sarpras damkar	0 Unit			
		Jumlah TKP damkar	26 Orang			
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	300 Objek	6.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1200 Unit	6.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>Total</b>				<b>12.291.394.000</b>		

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan prioritas pembangunan untuk mewujudkan tujuan, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini akan dilaksanakan Tahun 2023.

Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara ( PPAS ) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyesuaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja Perangkat Daerah ) Tahun 2023.

Demikian Ranwal Renja Perangkat Daerah ini kami buat, dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan kami harapkan demi kemajuan bersama dan semoga bermanfaat.

Kudus, 12 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KUDUS



**Drs. KHOLID, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650130 199203 1 005



## LAMPIRAN

Timeline Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

No	Kegiatan	Tahun			
		2022	2023	2023	2023
		TW			
		IV	I	II	III
1	Penyusunan Ranwal Renja 2023				
2	Penyusunan Rankhir Renja 2023				
3	Penyusunan Renja 2023				
4	Penyusunan Perubahan Renja				